

Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi

Dr. Nunung Prajarto



PENDAHULUAN

Saudara mahasiswa, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti “hubungan yang saling tergantung antara bagian yang satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan, baik berasal dari alam ataupun yang diproduksi oleh manusia” (Brockhaus, 1973). Sistem juga bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip. Sistem merupakan hubungan antara bagian-bagian dalam sistem. Masing-masing bagian tersebut bekerja secara independen. Namun, untuk mencapai tujuan sistem, sistem-sistem tersebut secara bersama-sama saling berhubungan. Sistem beroperasi dalam sebuah lingkungan yang kompleks. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. Sistem politik merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan yang bersifat politik, sistem ekonomi merupakan sistem yang beroperasi untuk mencapai tujuan yang sifatnya ekonomi, demikian pula sistem budaya merupakan sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan budaya.

Parsons meyakini ada empat fungsi penting yang diperlukan oleh semua sistem. Empat fungsi tersebut dapat disingkat menjadi AGIL, yaitu sebagai berikut. (Ritzer dan Goodman, 2004)

1. *Adaptation* (A): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal di luar dirinya dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (G): sebuah sistem harus memiliki tujuan utama.
3. *Integration* (I): sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya.
4. *Latensi* (L) atau pemeliharaan pola: sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam analisis sistem yang diterapkannya. Gambar di bawah ini merangkum struktur sistem tindakan menurut skema AGIL:

Fungsi Latensi (L) Sistem Kultural	Fungsi Integrasi (I) Sistem sosial
Fungsi Adaptasi (A) Organisme Perilaku	Fungsi <i>Goal Attainment</i> (G) Sistem Kepribadian

Gambar 1.1.
Struktur Sistem Tindakan menurut Skema Agil

Hal di atas menunjukkan bahwa organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan upaya menyesuaikan diri dengan tantangan sistem terhadap lingkungan eksternalnya. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh sistem. Sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponen sistem. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Perlu diingat bahwa empat sistem tindakan ini tidak muncul dalam kehidupan nyata, namun lebih merupakan peralatan analisis semata.

Selanjutnya, apabila kita membandingkan antara sistem politik, sistem sosial dan sistem komunikasi maka akan terlihat beberapa karakteristik spesifik dari tiga jenis sistem tersebut. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada Modul 1 ini. Secara umum, Modul 1 ini akan membantu Anda untuk mampu membandingkan karakteristik dari sistem politik, sistem sosial, dan sistem komunikasi. Secara khusus, tahapan dalam mempelajari sistem sosial, sistem politik, dan sistem komunikasi ini akan diuraikan dalam 3 kegiatan belajar.

Kegiatan Belajar 1 : menguraikan tentang Karakteristik dari Sistem Sosial.
Kegiatan Belajar 2 : menguraikan tentang Karakteristik dari Sistem Politik.
Kegiatan Belajar 3 : menguraikan tentang Karakteristik Sistem Komunikasi.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sistem Sosial

Sistem sosial adalah keseluruhan organisasi hubungan sistemik antara posisi-posisi atau kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Sistem sosial dapat dipandang sebagai struktur sosial dan proses sosial. Sistem sosial sebagai struktur sosial memiliki arti bahwa sistem sosial merupakan ruang multidimensi (*multidimensional space*) di mana posisi sosial dan afiliasi kelompok didistribusikan. Sebaliknya, sebagai proses sosial, sistem sosial menunjuk pada proses berbagai posisi sosial dan kelompok, yang terjalin ke dalam hubungan sistemik satu sama lain. Dengan pengertian yang demikian maka pemahaman sistem sosial sebagai struktur ataupun proses tak dapat dipisahkan.

Dalam pengertian yang semacam ini maka berbicara mengenai pengertian sistem sosial akan sangat lekat dengan parameter struktur sosial, yakni kriteria implisit yang membedakan para anggota masyarakat di dalam hubungannya satu sama lain. Terdapat 2 jenis parameter struktur sosial, yaitu parameter nominal dan parameter gradual. Parameter nominal mendistribusikan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dengan batas-batas yang bersifat diskrit, tanpa adanya konotasi perbedaan jenjang. Beberapa contoh dari parameter nominal, antara lain seks, ras, agama, suku bangsa, marga, mata pencaharian, tempat kerja, tempat tinggal, status perkawinan, afiliasi politik, kebangsaan, dan bahasa. Parameter gradual membedakan populasi suatu masyarakat ke dalam berbagai status sosial berjenjang (*status rank order*). Parameter ini tak membedakan berbagai strata secara tegas, contohnya pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, kewenangan, umur, dan kecerdasan.

Membicarakan sebuah masyarakat dalam perspektif sistem sosial akan mengarah pada diskusi mengenai kemajemukan masyarakat berdasarkan struktur sosial yang membentuknya, integrasi sosial ataupun konflik dalam masyarakat. Masyarakat dengan *setting* tradisional ataupun modern juga menjadi kajian yang sangat menarik dalam sistem sosial. Sebuah proses yang terjadi di masyarakat bisa membawa dampak sosial dan politik yang tak sederhana. Misalnya saja proses industrialisasi yang berlangsung dalam sistem masyarakat Indonesia yang berlatar belakang agraris, tradisional, primordial, dan pre-kapitalis membawa dampak sosial yang berpengaruh

pada bekerjanya sistem kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun *konflik* yang terjadi secara sosial *budaya*.

Seperti dikemukakan di atas, sistem sosial dikatakan sebagai sistem yang menjalankan fungsi integrasi dengan melakukan pengendalian pada bagian-bagian yang menjadi komponennya. Menurut Talcott Parsons, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari beberapa elemen pokok, yaitu *pertama*, sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik. *Kedua*, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan. *Ketiga*, adanya sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Perhatian utama Parsons lebih tertuju pada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem. Konsep-konsep kunci dalam sistem sosial adalah aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur.

Parsons menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. *Pertama*, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. *Kedua*, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. *Ketiga*, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. *Keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. *Kelima*, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Keenam*, apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, harus dikendalikan. *Ketujuh*, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Dalam sistem sosial, sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangannya. Contoh dari sistem sosial adalah semua jenis kehidupan kolektif, namun sistem sosial khusus dan sangat penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri melalui elemen-elemen dalam dirinya sendiri. Di dalam masyarakat, terdapat empat struktur yang penting berdasar fungsi-fungsi AGIL. *Pertama*, subsistem ekonomi, yaitu subsistem yang menjalankan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. *Kedua*, sistem politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan sistem sosial dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan

memobilisasi aktor serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, sistem *fiduciary* (sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. *Keempat*, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh hukum), yang mengoordinasikan berbagai komponen masyarakat.

Sistem sosial dalam masyarakat yang dinamis ditandai oleh kehandalan masing-masing subsistem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan sistem. Dengan kata lain, apabila kita menggunakan cara analisis Parson di atas untuk mengukur kehandalan sistem sosial tertentu maka kita harus melihat dan menilai sejauh mana setiap sistem yang menjadi elemen pokok dalam sistem sosial mampu menjalankan fungsinya secara handal. Misalnya, bagaimana sistem ekonomi menjalankan fungsinya untuk memobilisasi aktor dan sumber daya yang dimilikinya, demi mempertahankan eksistensi dirinya dalam menjawab tuntutan eksternalnya. Pertanyaan yang sama bisa diajukan untuk sistem yang lain yaitu berkaitan dengan sistem politik, sistem komunitas kemasyarakatan ataupun sistem *fiduciary* dalam masyarakat. Semakin seluruh elemen sistem mampu menjalankan perannya maka implikasinya akan membawa pada kehandalan totalitas seluruh sistem.

Sebagai ilustrasi, berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, apabila kita dekati dan analisis sistem sosial Indonesia berdasarkan pendekatan sistem maka kita dapat mengurainya dengan melihat secara rinci dari kualitas masing-masing sistem yang menjadi subsistem dari sistem sosial Indonesia secara makro. Berkaitan dengan sistem ekonomi, guncangan-guncangan perekonomian Indonesia sejak 1996 hingga pertengahan 2008 ini menunjukkan bahwa performa sistem ekonomi Indonesia tidaklah begitu menggembirakan. Sistem ekonomi Indonesia belum mampu memobilisasi aktor dan sumber daya (baik material nonmaterial) secara total sehingga secara keseluruhan sistem ekonomi internal tak mampu mengikuti tuntutan global.

Pada fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) kualitas sistem politik, dalam hal ini pemerintahan Indonesia, juga tidak bisa dibilang mencapai performa yang terbaik. Masih banyak sekali benturan-benturan yang mengakibatkan pencapaian tujuan akhir sistem tak tercapai. Benturan-benturan masih terjadi pada level suprastruktur (pemerintahan-formal) ataupun level infrastruktur (nonformal) yang bisa kita tengarai dengan

munculnya beragam konflik yang muncul. Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai sistem politik, Anda dapat melihatnya pada modul lain dalam Buku Materi Pokok (BMP) ini. Berkaitan dengan integrasi sistem, bangsa Indonesia juga masih mengalami problem yang tak kalah beratnya. Tidak berfungsinya lembaga hukum yang mengganggu keseimbangan antara satu subelemen dengan subelemen lainnya juga menjadikan integrasi antarsistem tak berjalan sesuai harapan yang dirumuskan oleh sistem *goal attainment* bangsa Indonesia. Dalam konteks *latency* atau pemeliharaan norma masyarakat, bangsa ini mengalami problem yang tak kalah peliknya. Adat, tradisi atau *custom* dalam masyarakat modern Indonesia semakin memudar seiring dengan penguatan nilai-nilai modern. Dalam kondisi semacam ini, tantangan sistem sosial Indonesia menjadi semakin kompleks untuk mempertahankan sistem sosial Indonesia.

Dalam sistem sosial, para penganut teori *konflik* berpendapat bahwa masyarakat bisa tereintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Konflik-konflik yang terjadi secara vertikal dan horizontal dalam masyarakat Indonesia menunjukkan kekompleksan integrasi yang sangat dan harus dibenahi di dalam masyarakat Indonesia. Persoalan kadang bertambah sulit ketika hubungan sosial di dalam masyarakat yang semestinya damai tersisipi oleh kekuatan lain yang tidak menginginkan hal itu terjadi. Dalam hal terjadinya konflik semacam itu, hal yang paling perlu dipakai untuk mencari solusinya adalah tidak dengan saling menyalahkan, serta waspada terhadap potensi masuknya pengaruh-pengaruh lain yang bermain demi kepentingan mereka masing-masing.

Konflik vertikal terjadi antara golongan masyarakat dengan elit pemerintah dalam struktur formal. Sebagai contoh, kejadian tahun 1998, yang bermuara pada jatuhnya rezim Orde Baru, disebabkan oleh ketidaksepakatan antara masyarakat dan penguasa terhadap capaian hasil dan cara-cara pembangunan yang dijalankan. Dari kacamata sejarah, peristiwa itu adalah sesuatu yang harus dan dalam kenyataan sudah terjadi. Dari kacamata analisis sosial, kejadian itu bukan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dicarikan pemecahan masalahnya. Konflik ini pun bisa dicegah dari sisi kerugian sosial yang ditimbulkannya kalau deteksi dini terhadap potensi

konflik dilakukan secara cermat dan tidak terjebak pada kepentingan politik yang cenderung menjadi panglima pada saat itu.

Konflik horizontal terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang setara. Pada tingkatan ini konflik dapat berupa ketidaksepahaman masyarakat dalam menentukan prioritas hubungan sosial atau karena kecenderungan untuk mendapat klaim politik sebagai suatu kelompok yang lebih unggul dan harus diperhatikan. Seperti telah disinggung di muka, konflik horizontal yang demikian terjadi karena faktor-faktor riil penyebab konflik muncul ke permukaan, namun dapat pula terakselerasi oleh hasil kerja pihak lain yang menginginkan instabilitas tertentu di dalam satuan sosial tertentu. Istilah adanya aktor intelektual, *master mind*, dan provokator secara mudah menunjukkan adanya faktor luas pemicu konflik sosial. Hal yang lebih perlu dicermati sesungguhnya adalah bagaimana faktor-faktor itu bekerja, motivasi pemunculan konflik, dan benar atau tidaknya provokator itu masuk ke dalam suatu satuan sosial. Bukan tidak mungkin apabila provokator sekadar dipakai sebagai alasan untuk menutupi ketidakmampuan dalam mengungkap konflik yang terjadi atau adanya benturan serta kesulitan dalam menyelesaikan konflik itu.

Pemicu konflik sangat beragam dan kerap dikaitkan dengan ragam konflik yang terjadi. Sebagai contoh, konflik dalam konteks suku, agama, ras dan antar golongan yang biasa dikenal dengan istilah konflik SARA. Berkaca pada kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, konflik-konflik yang demikian sangat berkemungkinan sekali terjadi. Upaya untuk menyatukan kemajemukan dengan membangun kultur tunggal pun kerap sekali gagal karena pada dasarnya kemajemukan tidak perlu ditunggangkan. Tentu hal ini terkait pula dengan kecerdasan hati dan kedewasaan cara pandang untuk melihat perbedaan. Apabila dua hal ini dimiliki, kemajemukan tidak perlu disesali dan secara nyata harus diterima sebagai kekayaan yang wajar dan harus ada.

Pada satu titik, konflik horizontal yang mudah meletus adalah konflik karena agama (lihat Modul 9) dan konflik karena alasan suku. Agama dapat menjadi pemicu konflik sosial yang cepat karena hal-hal yang diyakini dari suatu ajaran agama merupakan suatu hal yang bersifat sensitif untuk diperdebatkan dan dipertentangkan. Cara terbaik untuk mencegah terjadinya konflik ini tentunya dengan menjauhkan agama dari potensi perdebatan, menghindarkan diri dari usaha mencela agama lain, dan lebih mengarahkan pendewasaan dan perbaikan cara beragama secara internal. Menempatkan

agama sebagai persoalan pribadi dan kemudian membenahinya secara bertahap ke keluarga, lingkungan sosial terkecil dan baru kemudian ke lingkungan yang lebih besar dapat dipandang sebagai cara yang lebih bijak daripada memaksakan kebenaran dan memaksa orang lain untuk mengikuti. Pengendalian diri dan memberi teladan keagamaan menjadi langkah yang lebih terpuji dalam hal ini.

Persoalan berbasis kesukuan juga menjadi penyebab kuat terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat. Peristiwa dan kasus konflik yang dilandasi kesukuan ini sering terjadi di Indonesia dan membutuhkan kedewasaan tersendiri dalam menyikapinya. Dasar dari upaya itu adalah menyadari bahwa ketika diskriminasi perlakuan terjadi karena perbedaan suku dan karena agama juga sesungguhnya maka pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia telah dilakukan. Hal inilah yang kerap tidak disadari dan kemudian menempatkan konflik antarsuku sebagai konflik yang biasa. Tentu kita mudah mengenali terjadinya konflik antarsuku yang pernah ada di Indonesia. Sebagai contoh, konflik yang kemudian ditengarai sebagai pertentangan antara pribumi dan nonpribumi, serta konflik yang terjadi di Kalimantan dan Papua beberapa tahun belakangan ini.

Hal yang perlu terus dicermati adalah eskalasi konflik yang dapat terjadi karena ketidakmampuan mengendalikan konflik awal. Konflik antarsuku dapat berkembang menjadi konflik antaragama atau sebaliknya, apabila kemajemukan juga terjadi lintas suku. Konflik pribadi atau perseorangan dapat membesar pula menjadi jenis konflik yang lain, ketika solidaritas dibawa-bawa, tribalisme disertakan atau agama dikaitkan dengan konflik perseorangan itu. Tentu saja dalam hal ini solidaritas serta sifat kesukuan dan agama hanya dipakai sebagai akselerator konflik dan bukan sebagai sumber konflik yang sebenarnya.

Dalam suasana kemasyarakatan Indonesia yang mengarah ke demokratis, konflik seperti itu sering kali tak terhindarkan. *Pertama*, masyarakat bisa jadi memang belum siap dengan masalah “perbedaan” dan keharusan untuk menyikapi “perbedaan” yang jamak terjadi dalam suasana demokrasi. *Kedua*, sebagian masyarakat masih merasa perlu untuk melakukan dominasi dan pemaksaan kehendak terhadap sebagian masyarakat yang lain. *Ketiga*, pemaknaan demokrasi dilakukan tidak secara menyeluruh. *Keempat*, karakter masyarakat yang tidak sadar tentang makna hakiki asasi manusia cenderung menjadikan konflik fisik sebagai cara cepat untuk menyelesaikannya.

Sering kali kita saksikan di sekitar kita ataupun melalui media massa berbagai ketidakpuasan dari berbagai golongan masyarakat kepada pemerintah dalam berbagai kasus, demikian pula tindakan-tindakan anarkis saling serang antar kelompok masyarakat yang kesemuanya itu menunjukkan terjadinya konflik vertikal dan horizontal di Indonesia. Ini semua merupakan fenomena yang menjadi tantangan sistem sosial Indonesia sampai sekarang. Persoalannya tentu kembali pada seberapa mampu rakyat Indonesia menyikapi konflik sosial yang ada, dan bagaimana sebenarnya yang dikehendaki rakyat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia didapat dari perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan sistem sosial, jelaskan!
- 2) Parsons merumuskan ada 4 fungsi sistem? Apa sajakah fungsi tersebut, dan bagaimana penjelasannya?
- 3) Apa yang dimaksud konflik vertikal? Jelaskan!
- 4) Apa yang dimaksud dengan persyaratan fungsional dalam sistem sosial? Jelaskan!
- 5) Bagaimana menurut pendapat Anda kualitas sistem sosial masyarakat Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan tersebut, pelajari dengan cermat materi Kegiatan Belajar 1. Apabila Anda belum paham diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Keberadaan sistem sosial, sistem politik, dan sistem komunikasi, memiliki fungsi tersendiri dalam menjalankan serangkaian norma yang berbeda satu dengan lainnya. Sistem sosial menjalankan serangkaian

tatanan yang mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat menuju fungsi-fungsi integrasi. Menurut Parsons, di dalam masyarakat terdapat empat struktur yang penting berdasarkan fungsi-fungsi AGIL. *Pertama*, subsistem ekonomi adalah subsistem yang menjalankan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternalnya melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. *Kedua*, sistem politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan sistem sosial dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, sistem *fiduciary* (sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. *Keempat*, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh hukum), yang dilakukan dengan atau berusaha mengoordinasikan berbagai komponen masyarakat.

Dirumuskan pula oleh Parson sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. *Pertama*, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. *Kedua*, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. *Ketiga*, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. *Keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. *Kelima*, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Keenam*, apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, harus dikendalikan. *Ketujuh*, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa. Dalam sistem sosial, sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangannya.

Sistem sosial dalam masyarakat yang dinamis ditandai oleh kehandalan masing-masing subsistem dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan sistem. Dalam sistem sosial, para penganut teori konflik berpendapat bahwa masyarakat bisa terintegrasi atas paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Konflik-konflik yang terjadi secara vertikal dan horizontal dalam masyarakat Indonesia menunjukkan kekompleksan integrasi dalam masyarakat Indonesia.

**TES FORMATIF 1**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sistem secara umum dapat dipahami sebagai berikut, *kecuali*
 - A. tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip
 - B. dilihat dari proses pembentukannya, sistem diproduksi oleh alam, dan tak bisa diproduksi oleh manusia
 - C. hubungan yang saling tergantung antara satu bagian dengan bagian lainnya membentuk satu kesatuan
 - D. Parsons meyakini ada 4 fungsi penting yang diperlukan oleh semua sistem, yaitu fungsi pencapaian tujuan, fungsi integrasi, fungsi adaptasi, dan fungsi pemeliharaan pola

- 2) Pengertian sistem sosial sebagai proses sosial adalah
 - A. sistem sosial merupakan ruang multidimensi di mana posisi sosial dan afiliasi kelompok didistribusikan
 - B. keseluruhan organisasi hubungan sistemik antara posisi-posisi atau kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat
 - C. gabungan pemahaman antara sistem sosial sebagai proses dan sebagai struktur sosial
 - D. proses berbagai posisi sosial dan kelompok terjalin ke dalam hubungan sistemik satu sama lain

- 3) Konsep-konsep kunci dalam sistem sosial menurut Parsons adalah
 - A. interaksi, aktor, lingkungan, kepuasan, dan kultur
 - B. aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik
 - C. aktor yang memiliki motivasi
 - D. aktor yang memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan

- 4) Fungsi *latency* dalam sistem sosial adalah
 - A. pemeliharaan norma masyarakat
 - B. mengundang masuknya nilai-nilai modern secara lebih luas
 - C. mengatasi konflik horizontal ataupun vertikal dalam masyarakat
 - D. memudarnya nilai-nilai bersama

- 5) Suatu integrasi sosial diperlukan terutama untuk
- A. mampu mengembangkan potensi kedaerahan
 - B. masyarakat tidak bubar dan tangguh menghadapi tantangan fisik maupun sosial budaya
 - C. agar tantangan dapat dielakkan
 - D. bersama melawan pemicu konflik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

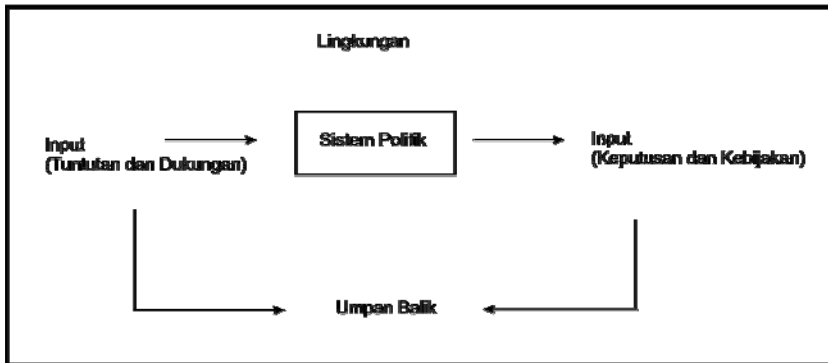
KEGIATAN BELAJAR 2

Sistem Politik

Sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan sistem atau pencapaian *goal attainment* dalam masyarakat. Sistem politik sering kali dipandang sebagai bagian dari sistem sosial. Menurut Talcot Parsons, sistem politik merupakan salah satu saja dari fungsi sistem sosial. Secara umum, sistem politik sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Secara parsial, sistem politik dipahami sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, dan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Seorang ahli ilmu politik, Robert A Dahl, merumuskan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Menurut David Easton, sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai, alokasi nilai ini bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Easton, pendekatan analisis sistem politik merupakan alat utama untuk mempelajari kehidupan politik suatu negara, terutama sistem politiknya. Easton mengamati kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, diterangkan mengenai bagaimana input sistem politik berupa tuntutan (*demand*), dukungan (*support*) dan yang berasal dari lingkungan sistem politik, berubah menjadi output berupa keputusan ataupun kebijaksanaan, setelah melalui suatu proses konversi. Selanjutnya, diterangkan bagaimana suatu output, setelah melalui mekanisme umpan balik (*feed-back*) ke dalam lingkungannya, dapat menghasilkan suatu input baru, baik berupa tuntutan ataupun dukungan terhadap sistem politik.

Jika digambarkan maka proses yang terjadi dalam sistem politik akan menghasilkan model sebagai berikut. (Macridis dan Brown: 1996).



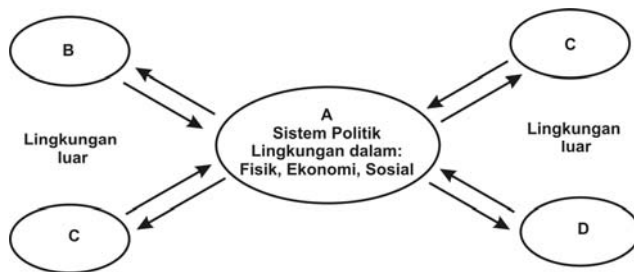
Gambar 1.2.
Model Sistem Politik menurut Macridis dan Brown

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, selanjutnya mengubah input melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini, masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik, lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan, untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Ahli politik lain, Gabriel Almond merumuskan bahwa sistem politik merupakan interaksi pada masyarakat independen yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, dengan menggunakan pelayanan atau pemaksaan oleh para pegawai, yang sedikit atau banyak menggunakan tekanan fisik yang sifatnya terlegitimasi. Gabriel Almond adalah seorang ahli ilmu politik yang menggunakan pendekatan struktural fungsional untuk menjelaskan sistem politik. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk struktur-struktur dalam sistem politik menjalankan fungsi-fungsinya. Almond mencoba mengadakan perbandingan atas prosedur dan cara bekerja suatu sistem politik. Almond menekankan apakah ada persamaan dan perbedaan dari struktur-struktur politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya di dalam suatu sistem politik, yaitu yang bersifat oligarki, monarki, demokratis ataupun totaliter.

Almond membagi lingkungan sistem politik ke dalam 2 dimensi, yaitu lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Hubungan antara sistem

politik dengan lingkungannya sangatlah erat sebagai bagian dari sistem masyarakat. Sistem politik selalu berinteraksi dengan lingkungan yang memengaruhinya maupun yang dipengaruhi. Sebagai contoh, berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungannya mengalir masuk ke dalam sistem politik, sebaliknya sistem politik memengaruhi pula lingkungannya. Sebagai contoh, pengaruh lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik berupa input – baik berupa tuntutan maupun dukungan, sedangkan hasilnya yang berupa output (keputusan atau kebijaksanaan) berpengaruh pula ke dalam lingkungan masyarakatnya. Pemikiran Almond dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.3.
Lingkungan Sistem Politik menurut Almond

Almond membahas kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam ataupun lingkungan luar terhadap dirinya. Menurutnya dengan mengetahui kemampuan sistem politik, kita dapat menilai apakah sistem politik di suatu negara akan stabil atau tidak. Cara mengukur kemampuan suatu sistem politik, yaitu dengan memperhatikan input-input atau pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam sistem politik, baik itu dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan luar.

Pada level praktis, sistem politik sering kali dikaitkan dengan kelembagaan politik yang ada, budaya politik dan perilaku-perilaku politik. Dalam hal ini, ada enam jenis kemampuan (kapabilitas) yang perlu dimiliki oleh setiap sistem politik, yaitu sebagai berikut.

1. Kapabilitas Ekstraktif.
2. Kapabilitas Regulatif.
3. Kapabilitas Distributif.
4. Kapabilitas Simbolik.

5. Kapabilitas Responsif.
6. Kapabilitas Domestik dan Internasional.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat ekstraktif terkait dengan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya. Hal ini meliputi sumber-sumber material yang dimiliki oleh sistem politik, misalnya kekayaan alam dan jumlah penduduk. Persoalan terhadap kapabilitas jenis ini cenderung muncul saat sumber-sumber ekstraktif ini dieksploitasi, digunakan bukan untuk kepentingan nasional atau kemudian dinikmati dengan distribusi yang tidak adil. Penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat disebut sebagai contoh dari penggunaan kekayaan ekstraktif yang tidak benar.

Ukuran terhadap kapabilitas ekstraktif ini, misalnya tampak dari pengelolaan pendapatan daerah ataupun nasional. Sesuai amanat undang-undang, kapabilitas ekstraktif ini tentunya harus dipakai untuk mendukung pembangunan nasional, baik melalui pengelolaan secara otonom di daerah ataupun terpusat (nasional). Tujuan umumnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai dengan penggunaan berbagai sumber daya itu secara benar, efektif, dan efisien. Pengingkaran terhadap potensi kapabilitas yang demikian tentu bersifat kontra produktif dengan arah pembangunan yang diharapkan dapat terdukung oleh tersedianya sumber-sumber yang terkategori ekstraktif ini.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat regulatif terkait dengan kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu ataupun kelompok individu yang ada dalam sistem politik. Kemampuan sistem politik ini dapat diketahui dari pola-pola tingkah laku individu ataupun kelompok, serta pengendalian yang dilakukan oleh sistem politik. Acuan dasar dari kapabilitas ini berupa konstitusi dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya. Harapan dari adanya kapabilitas regulatif ini adalah terselenggaranya tertib sosial, terjaganya persatuan, dan kesatuan bangsa, serta maksimalisasi bekerjanya sistem politik yang sudah ditentukan.

Persoalan muncul ketika kapabilitas regulatif ini dipermainkan oleh sejumlah individu atau kelompok untuk menekan dan memaksa kelompok lain mengikuti kemauan dan aturan yang mereka jalankan. Persoalan juga muncul dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang mestinya mengemban amanat untuk menegakkan regulasi yang ada, namun dengan

kewenangannya itu justru kemudian menggunakan regulasi atas dasar kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya sendiri. Pada titik seperti ini sesungguhnya kapabilitas regulatif suatu sistem politik telah dimandulkan dan menjadi hancur.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat distributif merupakan kemampuan suatu sistem politik untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat. Sumber-sumber yang didistribusikan meliputi berbagai jenis barang, jasa, kehormatan, status, dan kesempatan untuk memperolehnya. Semakin banyak bidang yang tersentuh oleh kemampuan distribusi dari sistem politik maka dikatakan kemampuan distributif sebuah sistem politik semakin baik.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemerataan distribusi, kecepatan distribusi, dan penguasaan atas distribusinya. Tidak hanya terhadap hal-hal ini, permasalahan distributif pun dapat muncul dari persoalan pemaknaan terhadap hal-hal yang mestinya didistribusikan dan ke mana hal-hal itu harus didistribusikan. Pada satu titik, dapat saja sistem politik itu terlihat positif karena mampu menjalankan fungsi distributifnya. Namun di sisi lain, dapat saja terjadi distribusi yang sudah berjalan itu dipandang belum maksimal karena terkait dengan persoalan penggunaan sumber daya ekstraktif dan landasan regulatif yang tidak diterapkan dan dijalankan secara maksimal pada sistem politik itu.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat simbolik terkait dengan kemampuan sistem politik untuk mengalirkan simbol-simbol dari suatu sistem politik ke dalam lingkungannya maupun keluar dari lingkungannya. Simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik meliputi nilai yang dianut oleh para pemimpin, hari-hari besar nasional, upacara kemiliteran dan berbagai acara simbolik lainnya. Ketika sistem politik kurang dipercaya ataupun menurun kredibilitasnya, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dirusaknya patung-patung ataupun simbol-simbol lain yang sarat dengan nilai-nilai politis.

Dalam hal kapabilitas simbolik ini, persoalan yang biasa muncul adalah dominasi penguasa atau pemerintah saat menentukan simbol-simbol yang dikomunikasikannya kepada publik. Kecenderungan yang biasa terjadi adalah kapabilitas simbolik ini dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat dan institusi lain tidak memiliki ruang dan wewenang untuk menyertakan simbol-simbolnya ini. Kecenderungan dominasi penguasa untuk mewacanakan

simbol-simbol ini kiranya dapat dengan mudah ditemui dalam sistem otoritarian dan sistem komunis. Dalam sistem libertarian, kapabilitas simbolik suatu sistem politik cenderung ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan tawar-menawar kekuatan untuk menghadirkan simbol-simbol itu.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau dukungan-dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Sistem politik yang secara cepat dan dinamis menanggapi tuntutan yang berasal dari lingkungannya dapat dikatakan memiliki kemampuan responsif yang tinggi. Sebaliknya, sistem politik yang tak cepat menanggapi tuntutan dari lingkungannya dikatakan sistem politik yang tak responsif.

Persoalannya tentu tak sekadar pada kecepatan suatu sistem politik dalam memberi respons atas berbagai tuntutan yang ada. Selain masalah kecepatan itu sendiri, hal lain dalam kapabilitas *responsive* yang perlu diperhatikan adalah pada kualitas respons yang diberikan dan sejauh mana respons tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan tuntutan yang berkembang. Dalam hal kapabilitas responsif ini pula kerap sekali pihak yang diberi mandat atau sudah memiliki mandat untuk merespons berbagai tuntutan ikut dipersoalkan.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat domestik dan internasional adalah kemampuan sistem politik dalam memperlihatkan keberadaannya secara domestik ataupun internasional. Berkait dengan kemampuan domestik, sistem politik yang mampu melakukan penetrasi pada sistem politik yang lain dikatakan memiliki kemampuan regulatif yang baik. Kemampuan responsif internasional dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan politik luar negeri sebuah negara. Kapabilitas semacam ini pada dasarnya dapat dipakai untuk melihat eksistensi suatu negara atau bangsa dengan sistem politiknya, yang dapat diterima secara domestik maupun dalam percaturan antarbangsa.

Persoalan ke depan dalam kaitannya dengan kapabilitas domestik dan internasional ini adalah pada kesiapan bangsa atau negara yang menjalankan sistem politik itu untuk meningkatkan daya saingnya. Pemikiran tentang masa depan ini diperlukan karena kondisi sekarang dengan berbagai tantangannya tentu berbeda dengan kondisi pada masa lalu dan akan berbeda pula dengan situasi di masa mendatang. Keterlenaan pada kapabilitas domestik dan internasional masa lalu dan masa sekarang, bukan tidak mungkin akan menyebabkan suatu negara hilang eksistensinya di masa

depan. Kasus pecahnya Uni Soviet dan terpecahnya beberapa negara Eropa Timur dapat dijadikan contoh untuk mempermudah pemahaman tentang suatu negara yang memikirkan peluang daya saingnya di masa mendatang jika kapabilitas domestik dan internasionalnya ingin tetap terakui.

Terdapat dua kutub yang juga sering kali didiskusikan saat membicarakan mengenai sistem politik di dunia, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem Politik Demokrasi

Akar kata demokrasi sendiri sudah muncul sejak zaman Yunani kuno, namun memiliki pengertian dan memiliki titik perhatian yang berbeda dalam perkembangannya kemudian. Pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan ruang untuk mewujudkan demokrasi murni, pada awal pertumbuhannya menjadi dasar dari perkembangan demokrasi seperti yang dikenal pada saat ini. Pada dasarnya, konsep ini digunakan untuk membicarakan mengenai keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang penting dalam masyarakat dan negara.

Sistem politik demokrasi biasanya dibedakan dalam tiga kategori, yaitu demokrasi perwakilan, demokrasi negara, dan demokrasi yang tak sempurna. Akar perkembangan demokrasi sendiri pada awalnya terkait dengan sekelompok kecil orang yang memerintah dan memiliki eksklusifitas yang tinggi. Demokrasi pada zaman dulu sangat terkait dengan bentuk demokrasi langsung, di mana perwakilan dan institusinya dipisahkan. Pada masa lalu, legislatif dan eksekutif bergabung dengan seluruh masyarakat secara bersama-sama.

Pada awal abad 19 dan 20, barulah "demokrasi" kehilangan eksklusifitasnya dengan semakin meluasnya pertimbangan tentang hak pilih masyarakat. Sekitar tahun 1863, Abraham Lincoln memperkenalkan konsep demokrasi sebagai "government of the people, by the people and for the people". Hal ini sebenarnya merupakan perkembangan yang luar biasa atas konsep sistem politik demokrasi. Setidaknya, penyertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah semakin besar dan secara serius dipertimbangkan. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kelompok wanita dan kelompok lain yang tetap tidak memiliki hak secara sama. Kelompok wanita dan penduduk asli atau suku asli kerap terabaikan hak-hak politiknya karena demokrasi pada waktu itu tetap dimaknai sebagai demokrasi dari, oleh dan untuk laki-laki.

Tak lama sebelum perang dunia pertama, barulah pemilihan umum secara universal dilaksanakan di negara-negara industri barat. Pengakuan atas hak-hak wanita dan suku asli (*indigenous people*) mulai mendapatkan tempatnya meskipun penerimaan dan pelaksanaan atas pengakuan itu dilakukan secara *gradual*. Hal yang terlihat dari sejarah masing-masing negara adalah bahwa pengakuan atas hak kaum perempuan dan penduduk asli ini cenderung tidak sama dan lebih ditentukan oleh beberapa kasus khusus yang terjadi, serta munculnya beberapa gerakan massa yang secara tak langsung berpengaruh pada perkembangan sistem politik demokrasi di negara-negara barat. Sejak itu, barulah dibicarakan bentuk demokrasi modern yang ditandai oleh inklusifitas.

2. Sistem Politik Otokrasi

Sistem politik otokrasi biasanya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu rezim otoriter dan rezim totaliter. Kejatuhan rezim komunis pada akhir tahun 80-an, telah memunculkan gelombang proses demokratisasi di seluruh belahan dunia sehingga diskusi mengenai sistem politik otokrasi tak lagi marak dewasa ini. Hal yang menarik walaupun sistem ini tidak populer, banyak negara yang menyebut dirinya demokrasi, meskipun dalam praktiknya negara-negara tersebut menjalankan sistem politik otoriter. Pada titik ini, demokrasi dihadirkan dan dipakai sebagai topeng atau “sabun cuci” untuk segala ketidakberesan pada sistem politik otokrasi ini. Sebagai contoh, Malaysia mengklaim dirinya sebagai demokrasi parlementer, namun dalam praktik kehidupan kenegaraannya karakter authoritarianisme masih sangat kuat. Demikian pula di Singapura dan Indonesia. di Indonesia hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Selama lebih kurang 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru, kendali di seluruh sektor masyarakat terpusat pada rezim orde baru. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kehidupan media yang sangat terkekang menjadi ciri yang paling jelas dalam praktik negara otoriter. Satu hal yang perlu diingat adalah pada dasarnya tak ada satu pemerintah pun yang akan menyebut dirinya otoriter. Sistem politik demokrasi akan dipandang sebagai sistem politik favorit walaupun pada tahap pelaksanaannya terwarnai oleh keotoriteran pemegang mandat kekuasaan dan sejumlah pihak pada kelompok eksekutif.

Saudara mahasiswa, Anda tentunya sempat mengalami masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sekarang coba Anda berikan beberapa contoh terhambatnya kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia dan contoh dari terkekangnya kehidupan media yang pernah Anda saksikan pada saat itu!

- a.
.....
.....
- b.
.....
.....

Hingga memasuki awal Abad XXI diskusi mengenai proses demokratisasi yang mengemuka khususnya mengenai prakondisi agar sistem politik bisa hidup dengan subur. Beberapa topik diskusi yang mengemuka, di antaranya konteks ekonomi dan demokrasi, kekuasaan dan demokrasi, modal sosial dan demokrasi, isu agama dan demokrasi, dan institusi serta demokrasi. Khususnya untuk negara di Asia, demokratisasi yang dikembangkan memiliki kekhasan karena lingkungan sosial dan politik yang memengaruhinya. Namun perlu diingat, kekhasan ini pula yang kerap dijadikan alasan negara-negara Asia dalam “menyelewengkan” demokrasi. Segala hal nantinya yang ditengarai tidak mencerminkan demokrasi yang sebenarnya, akan dipakai oleh sejumlah negara Asia tersebut untuk mengatakan bahwa hal itu adalah demokrasi dengan kekhasan Asia. Hal yang sama sebenarnya terjadi dalam pemaknaan universalitas hak-hak asasi manusia, yaitu saat kritik terhadap pelaksanaan penghormatan hak-hak asasi di Asia dijawab dengan kekhasan universalitas hak-hak asasi manusia dengan perspektif serta nilai-nilai dan budaya Asia. Misalnya saja di negara seperti Indonesia, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila yang diyakini nilai-nilainya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula sangat besar kemungkinannya negara-negara yang memiliki karakter dan nilai tersendiri yang dijunjung tinggi akan mewujud dalam mewarnai sistem politik yang dikembangkan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Banyak ahli mencoba mengemukakan definisi mengenai sistem politik. Coba sebutkan beberapa definisi tersebut dan jelaskan!
- 2) Bagaimana David Easton menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem politik?
- 3) Aristoteles memandang bahwa sistem politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Setujukah Anda, jelaskan!
- 4) Terdapat enam jenis kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh sistem politik. Jelaskan!
- 5) Apa yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan tersebut, pelajari dengan cermat materi Kegiatan Belajar 2. Apabila Anda belum paham diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Secara umum, sistem politik sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berupa proses pembuatan keputusan dalam negara. Robert A Dahl, merumuskan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan. David Easton lebih melihat bahwa sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai. Alokasi nilai ini bersifat memaksa, dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Easton, kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem.

Terdapat 6 jenis kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap sistem politik, yaitu kapabilitas sistem politik yang bersifat *ekstraktif* terkait dengan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya; sifat

regulatif terkait dengan kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu ataupun kelompok individu yang ada dalam sistem politik; kapabilitas sistem politik yang bersifat *distributif* merupakan kemampuan suatu sistem politik untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat; kapabilitas sistem politik yang bersifat *simbolik* berkaitan dengan kemampuan sistem politik untuk mengalirnya simbol-simbol dari suatu sistem politik ke dalam lingkungannya maupun keluar dari lingkungannya; kapabilitas sistem politik yang bersifat *responsif* berkaitan dengan kemampuan sistem politik untuk menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau dukungan-dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar; kapabilitas sistem politik yang bersifat *domestik dan internasional* adalah kemampuan sistem politik dalam memperlihatkan keberadaannya secara domestik ataupun internasional.

Dua kutub yang sering kali didiskusikan saat membicarakan mengenai sistem politik di dunia ini, di antaranya sistem politik demokrasi dan sistem politik otokrasi. Pada akhirnya sistem politik akan memengaruhi sistem komunikasi yang dikembangkan di masing-masing negara.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Input sistem politik menurut David Easton biasanya berupa
 - A. tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*)
 - B. kebijakan (*policy*)
 - C. informasi media massa
 - D. *black box*

- 2) Di bawah ini yang bukan menjadi definisi sistem politik
 - A. segala sesuatu tentang perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik
 - B. proses pembuatan keputusan dalam negara
 - C. diskusi mengenai kemajemukan masyarakat berdasarkan struktur sosial yang membentuknya, integrasi sosial ataupun konflik dalam masyarakat
 - D. proses pembentukan dan pembagian kekuasaan

- 3) Cara mengukur kemampuan suatu sistem politik, yaitu dengan
 - A. melihat optimalisasi fungsi-fungsi sistem
 - B. memperhatikan input-input atau pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam sistem politik baik itu dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan luar
 - C. memperhatikan prestasi sebuah sistem
 - D. totalitas efisiensi yang dapat dicapai sebuah sistem

- 4) Definisi sistem politik menurut David Easton adalah sebagai berikut
 - A. pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan wewenang
 - B. sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai, di mana alokasi nilai ini bersifat memaksa, dan mengikat seluruh masyarakat
 - C. usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, dan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik
 - D. interaksi pada masyarakat independen yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi

- 5) Kapabilitas sistem politik responsif adalah
 - A. sistem politik yang tidak menanggapi secara cepat dan dinamis tuntutan yang berasal dari lingkungannya
 - B. kemampuan sistem politik dalam memperlihatkan keberadaannya secara domestik
 - C. kemampuan sistem politik dalam memperlihatkan keberadaannya secara internasional
 - D. sistem politik yang cepat menanggapi secara dinamis dan cepat tuntutan yang berasal dari lingkungannya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Sistem Komunikasi**

Berbasis pada definisi yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann, seorang sosiolog terkemuka dari Jerman, sistem komunikasi diartikan sebagai sebuah sistem yang mendasarkan kerjanya pada kata “meaning.” Luhmann berpendapat bahwa komunikasilah yang menjadi basis bekerjanya sebuah sistem sosial. Sistem komunikasi memiliki fungsi spesifik untuk menyeleksi sejumlah informasi yang bertujuan untuk melakukan reduksi kompleksitas yang membedakan sebuah zona sistem komunikasi. Sistem komunikasi memiliki kriteria untuk menyeleksi setiap makna. Bagi Luhmann baik sistem sosial ataupun sistem fisik personal di dalamnya beroperasi berdasarkan proses pemaknaan.

Sistem komunikasi terkait dengan jaringan komunikasi yang tumbuh dalam masyarakat. Komponen-komponen yang dibahas saat membicarakan sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi nonmedia dan komunikasi bermedia. Sistem Komunikasi berbasis nonmedia, yaitu komunikasi yang berbasis sosial dan mewujud dalam perangkat norma-norma sosial yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pada tataran ini, mungkin negara Indonesia dapat berbangga dengan sistem komunikasi nonmediannya yang dalam banyak hal harus diakui telah berlangsung dengan baik. Di Indonesia, beberapa aktivitas komunikasi dan transaksi informasi yang ada dalam sistem komunikasi nonmedia, diakui dapat menyatukan masyarakat dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Pada titik ini, kebebasan berkomunikasi dan pendapat publik dapat berkembang baik di Indonesia dalam sistem komunikasi Indonesia yang berbasis nonmedia.

Sistem komunikasi bermedia terkait dengan komponen komunikasi bermedia misalnya pers dan media cetak lainnya, serta media penyiaran termasuk di dalamnya radio, televisi, dan film. Pada tingkat ini, sistem komunikasi dapat ditilik dari 3 hal, yaitu kebebasan berkomunikasi yang ada dalam sistem itu, opini publik yang berkembang dan tingkat kehidupan media massanya. Tiga hal tersebut nantinya dipakai untuk menjadi dasar dalam melakukan perbandingan sistem komunikasi dalam modul ini. Hal yang perlu dicatat adalah untuk masing-masing sistem akan terdapat perbedaan tingkat dalam hal kebebasan berkomunikasi, keragaman opini publik, dan tingkat kehidupan media massanya baik dari sisi isi maupun kepemilikan media.

Membahas mengenai sistem komunikasi nonmedia adalah terkait dengan sistem pengolahan informasi yang beredar di masyarakat dan tidak menggunakan media massa secara khusus, misalnya bagaimana penyampaian pesan dari pemimpin masyarakat melalui jalur-jalur formal ataupun nonformal tanpa media. Tumbuhnya media-media rakyat yang hidup bersama dengan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai dan tatanan kemasyarakatan.

Sedikit berbeda dengan sistem komunikasi nonmedia yang berkembang di Indonesia, sistem komunikasi media di Indonesia justru kurang jelas fungsi kehadirannya. Secara faktual, sistem komunikasi Indonesia mengacu pada ideologi Pancasila sehingga kemudian ada yang menyebut dengan sistem komunikasi Pancasila. Namun dalam praktiknya, ada yang menilai sistem komunikasi Indonesia lebih cenderung ke arah libertarian meskipun itu baru terjadi setelah Orde Baru jatuh. Bahkan dalam perkembangannya kemudian, ada pula yang menilai, sistem komunikasi Indonesia telah terlalu jauh melampaui sistem komunikasi libertarian (dalam sisi yang negatif) sehingga secara bergurau disebut dengan sistem komunikasi Amerika plus.

Sistem komunikasi bermedia mencakup diskusi tentang bagaimana sistem pers dan sistem penyiaran berlangsung di sejumlah negara dengan sistem yang berbeda-beda. Dalam hal ini, perbandingan sistem komunikasi bisa dilihat dari elemen-elemen dasar yang membedakannya. Beberapa ahli komunikasi menggunakan pengukuran yang berbasis pada elemen-elemen yang berbeda untuk membedakan antara satu sistem komunikasi dengan sistem komunikasi lainnya. Selain itu, sistem komunikasi juga sering dikaitkan dengan pengembangan telekomunikasi (sistem telepon, teleks, telegrap, dan jaringan komunikasi satelit). Dasar pemahaman sistem yang demikian, lebih merujuk pada sistem yang dipakai untuk memudahkan proses komunikasi dan aktivitas transaksi informasi di antara para pelaku komunikasi (aktor komunikasi). Berkaitan dengan perbandingan sistem komunikasi yang Anda pelajari ini, sistem komunikasi dengan basis bahasan teknologi komunikasi tidak ikut dijadikan basis perbandingan. Artinya, perbandingan sistem komunikasi yang akan dipelajari lebih bertumpu pada sistem komunikasi nonmedia dan sistem komunikasi media.

Sistem komunikasi juga bisa dibedakan dari karakteristik peran pers dan media lain dalam masyarakat. Klasifikasi berikut ini, disusun berdasar pada ragam tingkatan dari otonomi media yang ada di dalam suatu sistem

komunikasi, yang bisa jadi tidak atau belum dinyatakan secara khusus nama atau jenisnya, namun telah diterapkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

1. Kolaboratif, yaitu peran media pada saat negara masih sangat muda, atau baru merdeka, atau baru dibentuk dan pada waktu itu belum bisa maksimal jaminan keamanannya. Hal yang sama atau mirip terjadi ketika negara itu sedang menghadapi situasi perang atau berada dalam keadaan darurat sehingga media massa lebih dituntut kesadaran diri institusinya agar tidak menambah ketidakpastian yang terjadi.
2. *Surveillance*, yaitu saat peran media yang didesain sebagai *adversary* (penyerang), anjing penjaga (*watchdog*) dan pengatur agenda (*agenda setter*). Peran ini menonjol saat terjadi pelanggaran terhadap tatanan sosial dan moral, juga peran informasional saat membawa isu-isu penting untuk menarik perhatian komunitas. Pada intinya, peran demikian diarahkan agar media massa dalam sistem itu turut serta menjaga keamanan lingkungan.
3. Fasilitator, yaitu peran media yang diharapkan muncul dari keterlibatan jurnalis dalam mengupayakan atau menciptakan, menyelenggarakan dan melanggengkan perdebatan publik atas suatu *issue*. Esensi fungsi dari peran sebagai fasilitator ini ada pada gerakan jurnalisme sipil atau publik atau yang lebih dikenal dengan *civic journalism*. Dalam kaitannya dengan kehadiran media baru, internet contohnya, media massa menjadi fasilitator aktivitas transaksi informasi antarwarga masyarakat yang dalam pelaksanaannya kerap didukung oleh eksistensi media massa besar dan yang sudah cukup eksis di suatu negara.
4. Kritis/dialektik, yaitu peran media saat jurnalis memaknai secara radikal asumsi dan premis komunitas, mengarahkan pada terjadinya perdebatan publik dan selalu mempertanyakan tatanan politik. Peran media yang demikian di satu sisi membawa keuntungan karena pemberdayaan masyarakat atau pencerdasan pola pikir yang kritis dari masyarakat dapat diharapkan dari peran media massa semacam ini. Di sisi lain, sisi negatif atau kerugian dapat terjadi saat institusi media massa merasa dirinya sebagai entitas eksklusif yang merasa paling benar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal terakhir ini bukan tidak mungkin justru akan memunculkan kebingungan di dalam masyarakat, utamanya masyarakat yang sebenarnya belum siap dengan segala macam wujud keterbukaan.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas pula mengenai sistem pers dan sistem penyiaran yang merupakan kajian empiris mengenai sistem komunikasi bermedia.

1. Sistem Pers

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm (1956) *dalam* karya mereka mengenai teori Pers menggunakan basis-basis/elemen-elemen dasar pembeda untuk masing-masing sistem, yaitu sebagai berikut.

- a. Hakikat manusia.
- b. Hakikat masyarakat dan negara.
- c. Hubungan manusia dengan negara.
- d. Hakikat pengetahuan dan kebenaran.

Berdasarkan elemen-elemen ini maka terdapat karakter pembeda di antara masing-masing sistem. Mereka membagi sistem komunikasi pada empat model pers, yaitu pers otoritarian, pers libertarian, pers tanggung jawab sosial, dan pers Soviet komunis. Berdasarkan kategorisasi di atas maka peran pers dalam tiap-tiap sistem komunikasi yang dikembangkan akan berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

a. *Sistem pers otoritarian*

Hakikat manusia dalam masyarakat otoritarian dianggap sebagai makhluk yang tergantung, dituntun dan harus dibimbing. Hakikat negara dalam masyarakat otoritarian adalah negaralah yang memperoleh kekuasaan untuk menentukan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapainya. Negaralah yang menjadi pusat seluruh atribut keinginan dari manusia. Dalam masyarakat autoritarian, hakikat kebenaran adalah milik dari penguasa sehingga dalam posisi ini pers menjadi instrumen pemerintah. Dengan kata lain, sistem pers otoritarian pada dasarnya kurang memberi ruang pada institusi media untuk beraktivitas atas dasar kebebasan, dan mengembangkan wujud tanggung jawabnya sendiri. Penguasalah yang pada sistem ini bertindak sebagai regulator, pengontrol dan bahkan "hakim" bagi keberadaan institusi pers di negara itu. Negara-negara yang menjalankan sistem pers otoritarian pada dasarnya terkait dengan jenis sistem pemerintahan yang mereka jalankan, seperti kerajaan dan negara yang diperintah oleh kalangan militer.

b. Sistem pers libertarian

Dalam masyarakat libertarian, manusia dianggap sebagai makhluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah atau antara alternatif yang baik dan buruk. Mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers diposisikan sebagai penyaji bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak, untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok, mengungguli orang-perorangan dalam skala nilai karena tanpa negara orang-perorangan tidak sanggup mengembangkan atribut manusia yang berbudaya. Pers dalam konteks ini dianggap menjadi mitra dalam mencari kebenaran.

Dalam praktiknya, institusi media massa yang hidup dalam sistem komunikasi libertarian kerap secara gegabah mengartikan kebebasannya dan cenderung menuntut kebebasan yang lebih dari yang seharusnya dan sewajarnya mereka miliki. Pada tingkatan ini, akan muncul berbagai konflik antara institusi media dan pemerintah, serta antara institusi media dan masyarakat. Sejumlah konflik itu biasanya bermuara pada tuntutan agar media massa tidak berlebihan dalam menggunakan kebebasannya, sekaligus meminta mereka untuk berpikir tentang dampak dari hal atau aktivitas yang mereka lakukan.

c. Sistem pers tanggung jawab sosial

Sistem ini beranggapan bahwa pada hakikatnya manusia lebih banyak dipandang sebagai makhluk yang lebih banyak malasnya daripada irasionalnya. Akibatnya, ia menjadi mangsa empuk dari hasutan-hasutan yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Moralitas dalam pandangan teori tanggung jawab sosial tampaknya lebih relatif. Moralitas bukanlah kewajiban pada diri sendiri, namun sebagai makhluk sosial ia mempunyai kewajiban kepada sesamanya, khususnya kepentingan-kepentingan masyarakat. Negara juga perlu mendorong perlindungan bagi hak warga negara untuk mendapat informasi yang memadai.

Sistem pers yang demikian cenderung dapat menjembatani berbagai kepentingan tentang penggunaan kebebasan yang ada dalam sistem komunikasi otoritarian dan sistem komunikasi libertarian. Di antara para ahli ada yang menempatkan sistem komunikasi tanggung jawab sosial sebagai hasil kompromi dari kekurangan yang ada dalam sistem komunikasi libertarian dan otoritarian. Sebagai suatu hasil sintesis dari dua sistem

ekstrem itu, sistem komunikasi tanggung jawab sosial diharapkan lebih dapat diterima dan memiliki fungsi yang lebih baik, tak hanya untuk institusi media itu sendiri, tetapi juga baik bagi penguasa atau pemerintah dan juga bagi masyarakat.

d. Sistem pers komunis

Konteks masyarakat komunis lebih menekankan peran negara di atas peran individu. Semua elemen digerakkan untuk mencapai tujuan yang sama. Kepemimpinan politik diartikan sebagai kemampuan meyakinkan massa bahwa kebijakan partai adalah benar. Propaganda, agitasi, organisasi, penggunaan kekerasan selalu ada dalam pemikiran para pemimpin. Sistem komunikasi dalam hal ini menjadi instrumen pendukung yang handal dalam mencapai tujuan negara yang terealisasi dalam tujuan partai politik.

Sistem pers komunis dengan sendirinya menjadi arena pelayanan terhadap penguasa atau rezim komunis. Media massa, baik dari sisi kepemilikan maupun operasionalnya, akan selalu mengarahkan ideologi layanannya kepada negara, yang dalam hal ini rezim komunis sehingga kurang memberi perhatian pada layanan terhadap individu dan publik. Representasi layanan kepada penguasa dalam sistem pers komunis dipandang sebagai layanan mereka terhadap publik.

2. Sistem Penyiaran

Donald R. Brown (1989) menggunakan 5 elemen dasar yang akan memengaruhi sistem komunikasi dalam hal ini, sistem komunikasi yang dimaksud adalah sistem penyiaran, yaitu sebagai berikut.

a. Geografi

Geografi dan topografi wilayah akan sangat menentukan sistem penyiaran yang dikembangkan dalam sebuah negara. Sebuah wilayah negara yang sempit dan tak terlalu luas akan lebih tepat mengembangkan sistem penyiaran nasional, sedangkan wilayah yang luas akan lebih cenderung mengembangkan sistem penyiaran regional ataupun pelayanan lokal. Pertimbangan yang sama terjadi dalam hal ketinggian tanah atau permukaan tanah secara spesifik karena area yang luas dan datar akan berbeda dengan area pegunungan yang berbukit-bukit.

Karakteristik geografi negara tetangga juga perlu mendapatkan perhatian dan merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan sistem

penyiaran sebuah negara. Hal ini didasari kepentingan terhadap munculnya luberan informasi lintas perbatasan negara. Dengan dasar kenyataan ini maka kemudian kerap diadakan kerja sama bilateral atau multilateral yang secara khusus membahas faktor geografi semacam ini untuk sistem penyiaran negara-negara tersebut.

b. Demografi/linguistik

Demografi terkait dengan konteks persebaran penduduk dalam sebuah wilayah yang berdampak pada beragamnya budaya dan bahasa. Tak ada sistem penyiaran yang dapat melayani dan memuaskan seluruh masyarakat. Terdapat problem terkait dengan beragam kelompok budaya yang tak dapat dilayani melalui sistem penyiaran tertentu karena terbatasnya frekuensi udara. Televisi kabel yang memiliki banyak kanal menjadi penyelesaian terbaik dari problem semacam ini.

Acap kali sistem penyiaran dengan pertimbangan faktor demografi ini dipengaruhi pula oleh pertimbangan tentang karakter kultural masyarakat, termasuk di dalamnya hal-hal yang ditabukan oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian mengantar pada perbedaan sistem penyiaran di Malaysia dan Filipina, misalnya dan perbedaan sistem penyiaran antara Australia dan Indonesia dari sisi karakter atau ciri demografinya.

c. Ekonomi

Tak ada sistem pembiayaan yang mampu menjamin kemerdekaan dari interferensi eksternal. Terdapat beberapa kelemahan sekaligus kekuatan dari masing-masing skema pembiayaan. Beberapa model pembiayaan yang dikembangkan dalam sistem penyiaran, di antaranya periklanan, iuran televisi, *support* kelembagaan, anggaran negara, pemasaran jasa, kontribusi perusahaan dan individual. Model dan sumber pembiayaan yang demikian pada dasarnya suatu hal yang lumrah dalam suatu sistem komunikasi, meskipun beberapa negara menyelenggarakan sistem penyiaran yang melarang adanya iklan dalam stasiun televisi negara mereka, misalnya. Persoalannya, dengan bisnis media yang kini telah berubah dapatlah dikatakan bahwa nyaris tak ada sistem penyiaran yang benar-benar menghindar dari beragam sistem pembiayaan media yang berbasis pada pertimbangan ekonomi.

Dengan dasar pertimbangan pada pengaruh faktor ekonomi ini pula besaran institusi media di dalam suatu sistem komunikasi ditentukan.

Meskipun demikian, tidaklah selalu dapat dipakai sebagai acuan bahwa suatu sistem komunikasi dengan jumlah media massa yang besar sama artinya dengan kemakmuran yang ada pada negeri itu. Pada titik ini besarnya jumlah media massa yang ada biasanya lebih dikaitkan dengan besarnya ruang kebebasan bagi media massa untuk beraktivitas. Pada titik yang lain, namun demikian, acap kali dijumpai adanya kaitan antara faktor ekonomi dan faktor kebebasan yang ada untuk melihat eksistensi suatu sistem komunikasi, penyiaran, dan sistem pers di negara itu.

d. Politik

Seluruh sistem penyiaran akan dipengaruhi oleh sistem politik. Perizinan penyiaran diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan aturan dari *International Telecommunication Union* (ITU), sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menjaga pemanfaatan frekuensi agar tak saling mengganggu (interferensi) satu dengan lainnya. Organisasi ITU juga mensyaratkan agar izin penyiaran yang diberikan oleh negara mengatur beberapa basis teknis, yaitu frekuensi penyiaran, pengaturan waktu dalam sehari, kekuatan siaran, dan arah sinyal televisi. Kontrol terhadap isi siaran memang tidak tercantum secara formal dalam izin siaran, tetapi karena pemerintah kebanyakan berbasis pada kepentingan politik tertentu, basis interaksi politik, dan penyiaran sangatlah erat.

Faktor tekanan atau pertimbangan politik ini dalam menerapkan sistem penyiaran dan juga sistem pers ini akan terlihat kentara pada negara-negara komunis dan otoriter. Hal yang sedikit lebih rendah intensitas tekanan politiknya akan terjadi pada negara dengan dasar pemerintahan yang bersifat demokratis atau liberal.

e. Budaya

Faktor budaya terkait dengan elemen-elemen yang lebih spesifik berbasis pada bahasa, kelas ekonomi, agama, afiliasi politik, pendidikan, dan berbagai kombinasinya sehingga membentuk apa yang disebut sebagai karakter nasional. Faktor budaya dapat menjadi elemen penyatu dalam masyarakat atau sebaliknya juga bisa menjadi faktor pemecah. Pada titik inilah media massa dapat menarik perhatian publik untuk isu bersama atau pada saat tertentu media bisa melakukan tekanan-tekanan pada masyarakat sehingga lebih memberikan perhatian pada isu tertentu.

Faktor budaya ini pada dasarnya tidak begitu saja lepas dari pertimbangan atas faktor demografi yang ada. Pada satu titik, identitas budaya tertentu akan dipakai oleh komunitas atau orang-orang tertentu dalam mengisi aktivitas media pada suatu sistem penyiaran yang diberlakukan. Terkait dengan masalah kebudayaan ini, pertimbangan terhadap agama dapat dipakai sebagai cara untuk melihat penerapan sistem komunikasi yang ada.

Dalam konteks yang sama terkait dengan sistem penyiaran, penulis lainnya Tomas Coppens, Leen d'Haenens dan Frieda Saey lebih menekankan bahwa sistem penyiaran lebih dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang bersifat politis dan ketentuan-ketentuan formal lainnya. Seperti diungkapkannya sebagai berikut (Haenens and Saey: 2001) “each government has shaped its national broadcasting system in keeping with its own nature, especially its political nature”

Para penulis tersebut membandingkan secara ekstrem model “free” Amerika di satu sisi, dan di sisi lainnya model totalitarianisme Soviet. Tipologi di antara dua model ekstrem itu juga berkembang semakin kompleks dan merupakan percampuran di antara beberapa elemen, yaitu libertarianisme, teori tanggung jawab sosial, dan otoritarianisme. Beberapa tipologi media yang dimaksud oleh beberapa penulis di atas, di antaranya berikut ini.

1) Model Otoritarian

Model otoritarian dalam tipologi ini dijelaskan sebagai sebuah model sistem komunikasi di mana media menjadi bagian dari negara. Pers cetak, radio, dan televisi mendukung kepentingan negara tanpa syarat. Siebert mengemukakan bahwa seluruh unit komunikasi seharusnya mendukung pemerintahan sehingga negara dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, sensor merupakan alat yang paling utama dalam pengaturan mengenai media. Prinsipnya adalah bagi pemerintah otoritarian, keberagaman pandangan adalah sangat tidak berguna dan tidak bertanggung jawab, ketidaksetujuan merupakan fenomena yang sangat mengganggu dan sering kali subversif, dan konsensus, serta standardisasi merupakan sesuatu yang logis dan tujuan-tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi sebuah proses komunikasi massa. Model ini akan dijelaskan di bagian yang lebih khusus dari modul ini.

2) Model Komunis

Model komunis, model ini merupakan subkategori dari model otoritarian, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Berbeda dengan model

otoritarian, dalam sistem komunis media massa tidak dimungkinkan diselenggarakan oleh kelompok swasta, tetapi biasanya dimiliki oleh kelas yang berkuasa, yaitu partai komunis dan kelompok *onderbouw*-nya. Namun, persamaan juga terlihat jika mencermati sistem komunikasi model komunis ini, yaitu bahwa media massa dipakai untuk sarana persebaran informasi dari penguasa ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kekuasaan yang mereka miliki. Media biasanya difungsikan secara penuh sebagai media yang menjalankan sosialisasi, pendidikan, penyampaian informasi, motivator, dan penggerak massa (mobilisator).

3) Model Western-Paternalistik

Model barat-paternalistik (*western-paternalistic*): model sistem komunikasi ini dikembangkan di Inggris, dan sering disebut sebagai “paternalistic” karena sifat pendekatannya yang bersifat *top-down*: kebijakan media bukanlah produk dari apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, namun apa yang dipikirkan baik dan dibutuhkan oleh penguasa. diutamakan berisi program yang berisikan nilai-nilai yang seiring dengan apa yang diinginkan oleh kekuasaan daripada apa yang diinginkan masyarakatnya. Teori tanggung jawab sosial yang dikembangkan oleh Peterson tahun 1956 memiliki kesamaan dalam konteks tertentu dengan sistem ini, yaitu menekankan bahwa media memiliki tugas terhadap masyarakatnya dan penguasa memiliki wewenang untuk melihat apakah media telah memenuhinya. Model ini dikembangkan di negara-negara barat yang masih mengutamakan pola panduan yang kuat dalam pengaturan media. Sebagai contoh, negara-negara di wilayah Eropa.

4) Model Western-Libertarian

Model barat-libertarian (western, libertarian model): hampir mirip dengan model barat-paternalistik, tetapi perbedaan terpenting adalah pada fungsi komersialisasi media. Media menekankan fungsinya untuk memberikan informasi dan hiburan, namun ia juga memiliki fungsi ketiga yaitu berkembang untuk mendukung ekonomi, selanjutnya menjamin independensi mereka dalam aspek ekonomi, inilah yang kemudian disebut bahwa media menjalankan fungsi periklanan. Sebagai contoh, sistem penyiaran Eropa menjalankan fungsi libertarian walaupun kadang dalam beberapa wilayah tertentu kehadiran penyiaran publik yang bersifat nonkomersial.

5) Model kritis atau model media alternatif.

Model kritis atau alternatif, termasuk dalam kategori ini adalah institusi media penyiaran alternatif termasuk di dalamnya media bawah tanah (*underground*) dan media akar rumput (*grassroots*). Hachten seperti dikutip dalam Haenens dan Saeys menekankan pandangan yang cukup radikal berkaitan dengan model ini, “a concept of illegal and subversive communication utilizing the press and broadcasting to overthrow a government or wrest control from alien or otherwise rejected rulers.”

Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa model ini sangat identik dengan sebuah konsep komunikasi yang ilegal dan subversif, yaitu menggunakan pers dan penyiaran untuk menggulingkan sebuah pemerintahan atau pemegang kekuasaan yang ditolak lainnya. Model alternatif lainnya yang ditemukan di negara-negara berkembang adalah model konsep pembangunan. Pandangan ini lebih positif sifatnya daripada model revolusioner di atas, dan banyak dikembangkan di negara-negara berkembang yang biasanya ditandai oleh kurangnya dana dan infrastruktur. Terkait dengan hal ini McQuail menyatakan “In the circumstances it may be legitimate for governments to allocate resources selectively and to restrict journalistic freedom in some ways”.

Kutipan di atas sangat memberikan kemungkinan pada pemerintahan yang memiliki legitimasi untuk mengalokasikan sumber-sumber secara selektif dan membatasi kebebasan jurnalistik dalam banyak cara. Pada titik tertentu model ini tidak berbeda jauh dengan model otoritarian yang telah disinggung dalam modul ini sebelumnya. Dengan demikian, seberapa besar rentang keluwesan sistem komunikasi berlangsung di negara-negara seperti ini sangat ditentukan oleh kepekaan penguasa untuk memilih sumber-sumber hasil seleksinya dan seberapa besar kebebasan diberikan pada institusi media dan para pekerjanya.

Model selanjutnya yang bisa dimasukkan dalam kategori ini adalah model yang dikemukakan oleh McQuail, yaitu *democratic-participant theory* yang merupakan variasi dan pengembangan model barat-*paternalistic*. Dengan demikian termasuk di dalamnya adalah media akar rumput (*grassroots*), partisipasi dan garis komunikasi yang dua arah. Konsep-konsep model semacam ini biasanya dikembangkan sistemnya untuk melawan monopoli, birokrasi dan institusi televisi publik yang sangat sentralistik. Apabila terjadi permasalahan pada hal ini, persoalan tentunya lebih

bersumber pada kemampuan pihak-pihak yang berusaha terlibat dalam sistem komunikasi yang demikian.

Dari bagian pertama ini maka dapat dikatakan bahwa masing-masing sistem memiliki karakter dan warnanya sendiri. Sistem sosial sangat menekankan pada fungsi sistem untuk mengintegrasikan seluruh elemen untuk mencapai tujuan sistem masyarakat. Sistem politik memiliki karakter utama untuk merealisasikan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sehingga masyarakat dapat berjalan secara baik. Melalui sistem politik yang handal maka sebuah masyarakat akan secara optimal mencapai dan merealisasikan kehendak politik mereka. Secara internal kebutuhan masyarakat akan coba dilayani melalui sistem input, sistem konversi dalam *blackbox* yang handal, selanjutnya menjadi sistem output yang dapat benar-benar menjadi jawaban dari tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks output, sebuah sistem politik yang handal dapat dilihat dari konteks bagaimana hasil kebijakan menjadi respons yang handal dari tuntutan lingkungannya. Semakin lingkungan merespons secara baik hasil kebijakan yang ada maka sistem politik semakin teruji kualitasnya.

Sebagai ilustrasi dari sistem politik dapat dicontohkan mengenai bagaimana kualitas sistem politik Indonesia dalam mengatasi tuntutan masyarakat. Misalnya saja saat ini problem yang sering kali menjadi diskusi publik adalah masalah kemiskinan maka bagaimana respons pemerintah mengatasi masalah ini menjadi menarik untuk dikaji. Tuntutan akan perbaikan ekonomi yang semakin meluas di masyarakat, sering kali justru berhadapan dengan output kebijakan yang membuat kondisi ini tak membaik. Kenaikan BBM dan segala implikasinya yang berdampak negatif pada masyarakat justru menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Alasan yang diangkat adalah bahwa inilah kondisi yang tak terhindarkan akibat kenaikan harga minyak dunia. Pilihan yang semacam ini oleh sistem politik Indonesia tak terhindarkan mencerminkan betapa buruknya sistem politik Indonesia. Terkait dengan sistem politik demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia maka kualitas sistem politik juga akan dilihat sejauh mana pemerintah pada saat ini memenuhi prasyarat demokrasi.

Dari indikator internasional, Indonesia sering dinilai sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi yang masih kurang sempurna. Hal ini bisa dilihat dari kualitas relasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam merealisasikan tujuan politiknya, sekaligus dapat dilihat dari bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam proses politik yang dinamis. Bahkan tak

sedikit yang menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia dari hari ke hari semakin menurun karena pilar-pilar demokrasi tak cukup kuat menjalankan fungsinya. Lebih dari itu, demokrasi di Indonesia juga kerap dibaca sebagai demokrasi yang kebablasan karena masing-masing unsur di Indonesia berusaha menjalankan sendiri-sendiri pemaknaan mereka atas demokrasi, termasuk dalam mengoperasikan dan menjalankan peran, serta fungsi media massa.

Berkait dengan sistem komunikasi maka diskusi akan terkait dengan isu-isu komunikasi nonmedia ataupun yang bermedia dalam struktur komunikasi Indonesia. Kajian ini menjelaskan mengenai bagaimana struktur nonmedia dalam masyarakat yang menjadi saluran-saluran komunikasi. Misalnya, dalam proses input pada sistem politik media sosial apa saja yang digunakan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial semacam arisan ataupun kesenian-kesenian rakyat bisa menjadi contoh saluran komunikasi nonmedia yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Tak ada yang dapat menjamin bahwa sistem komunikasi nonmedia dapat lebih kuat perannya dan fungsinya di dalam masyarakat Indonesia, apalagi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada dan terus berlangsung secara cepat. Namun, peran yang berlangsung di dalam sistem komunikasi nonmedia di Indonesia ini tentu tak dapat dikesampingkan begitu saja.

Untuk sistem komunikasi bermedia, diskusi terarah pada sistem media pers cetak dan media penyiaran yang dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Sistem media biasanya meliputi harapan dan idealisme yang tumbuh di masyarakat tentang pemfungsian pers di satu sisi dan tujuan-tujuan masyarakat yang bisa dioptimalkan melalui optimalisasi media. Secara sederhana barangkali bisa dikatakan bahwa sistem komunikasi dengan media pada dasarnya merupakan sebuah tatanan sistem yang diharapkan mampu memberi makna bagi manusia, bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi terselenggara dan terjaminnya harkat manusia yang hidup dalam suatu sistem politik tertentu.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang Anda pahami mengenai sistem komunikasi?
- 2) Apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi nonmedia dan apa yang dimaksud dengan sistem komunikasi bermedia? Jelaskan dan sebutkan beberapa contohnya!
- 3) Menurut McQuail, sistem komunikasi bisa dibedakan dari karakteristik peran pers dan media lain dalam masyarakat, sebutkan kategorisasi otonomi media yang dibuatnya dan Jelaskan!
- 4) Siebert, Peterson, dan Schramm membagi sistem komunikasi dalam berapa kategori, Jelaskan!
- 5) Elemen apa saja yang menurut Donald R. Brown memengaruhi sistem penyiaran? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan tersebut, pelajari dengan cermat materi Kegiatan Belajar 3. Apabila Anda belum paham diskusikan dengan teman-teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Terkait dengan sistem komunikasi, tema utama yang mendapat perhatian adalah isu-isu komunikasi nonmedia ataupun yang bermedia dalam struktur komunikasi masyarakat. Kajian ini menjelaskan mengenai bagaimana struktur nonmedia dalam masyarakat yang menjadi saluran-saluran komunikasi. Misalnya, dalam proses input pada sistem politik media sosial apa saja yang digunakan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial semacam arisan ataupun kesenian-kesenian rakyat bisa menjadi contoh saluran komunikasi nonmedia yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakatnya.

Untuk sistem komunikasi bermedia, diskusi terarah pada sistem media pers cetak dan media penyiaran yang dikembangkan dalam masyarakat. Sistem media biasanya meliputi harapan dan idealisme yang

tumbuh di masyarakat tentang pemfungsian pers di satu sisi dan tujuan-tujuan masyarakat yang bisa dioptimalkan melalui optimalisasi media.

Sistem komunikasi media dalam hal ini pers bisa dibedakan karakteristiknya dari satu negara ke negara lainnya. McQuail, mengklasifikasikannya berdasar pada ragam tingkatan dari otonomi media di antaranya, fungsi kolaboratif, fungsi *surveillance*, fungsi fasilitator, dan fungsi kritis/dialektik. Sistem komunikasi khususnya yang terkait dengan pers, dibedakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam 4 model, yaitu pers otoritarian, pers libertarian, pers tanggung jawab sosial, dan pers Soviet komunis. Kategorisasi ini sangat kental diwarnai oleh pengaruh sistem politik yang berlaku di masing-masing negara. Implikasinya sistem komunikasi yang dikembangkan akan berbeda-beda. Terkait dengan sistem penyiaran, Donald R. Brown menggunakan 5 elemen dasar yang dinilainya akan memengaruhi sistem komunikasi. Dalam hal ini, sistem penyiaran yaitu faktor geografi, demografi/linguistik, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam konteks yang sama terkait dengan sistem penyiaran, penulis lainnya Tomas Coppens, Leen d'Haenens, dan Frieda Saey lebih menekankan bahwa sistem penyiaran lebih dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang bersifat politis dan ketentuan-ketentuan formal lainnya.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Definisi sistem komunikasi adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. sistem yang mendasarkan kerjanya pada kata “meaning”
 - B. sistem komunikasi tidak terkait dengan jaringan komunikasi yang tumbuh di masyarakat
 - C. komunikasi merupakan basis bekerjanya sebuah sistem sosial
 - D. sistem sosial ataupun sistem fisik personal yang beroperasi berdasarkan proses pemaknaan

- 2) Pemahaman sistem komunikasi terdiri dari dua struktur besar
 - A. media dan nonmedia
 - B. pers dan penyiaran
 - C. media sosial dan hiburan rakyat
 - D. infrastruktur dan suprastruktur

- 3) Terkait dengan struktur komunikasi nonmedia adalah
- A. radio
 - B. televisi
 - C. kesenian Rakyat
 - D. pers Cetak
- 4) Fungsi kolaboratif media diharapkan dapat direalisasikan media pada kondisi negara
- A. merdeka
 - B. stabil
 - C. genting dan masih muda
 - D. aman terkendali
- 5) Elemen-elemen pokok yang memengaruhi pengembangan sistem komunikasi penyiaran adalah
- A. karakter kebangsaan dan sistem masyarakat
 - B. hakikat manusia dan masyarakat
 - C. frekuensi dan kebijakan siaran
 - D. geografi, demografi, ekonomi, politik, dan budaya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) A
- 5) B

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) C
- 3) A
- 4) B
- 5) D

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) C
- 4) C
- 5) D

Daftar Pustaka